

## Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Kesadaran Demokrasi

Widiya Julita<sup>1</sup>, Rahma Aulia<sup>2</sup>, Deylla Zahra Windita<sup>3</sup>, Saifana Kalda<sup>4</sup>, Elsa Patricia<sup>5</sup>, Hamdi Abdullah Hasibuan<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Indonesia

[widiya.julita5151@student.unri.ac.id](mailto:widiya.julita5151@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [rahma.aulia5910@student.unri.ac.id](mailto:rahma.aulia5910@student.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [deylla.zahra5165@student.unri.ac.id](mailto:deylla.zahra5165@student.unri.ac.id)<sup>3</sup>, [saifana.kalda3877@student.unri.ac.id](mailto:saifana.kalda3877@student.unri.ac.id)<sup>4</sup>, [elsa.patricia6006@student.unri.ac.id](mailto:elsa.patricia6006@student.unri.ac.id)<sup>5</sup>, [hamdi.abdullah@lecturer.unri.ac.id](mailto:hamdi.abdullah@lecturer.unri.ac.id)<sup>6</sup>

### ABSTRACT

*Civics is designed as a learning subject that contains cognitive, affective, and psychomotor dimensions that are confluent or interpenetrating and integrated in the context of the substance of the ideas, values, concepts, morals of Pancasila, democratic citizenship, and national defense. The method used in this study is a literature review and secondary data analysis, this study also aims to foster democracy by encouraging the development of information, attitudes, ideas, and citizenship skills applied by the government and other stakeholders in strengthening the application of Pancasila values in various sectors of national and state life. Implementation of Democracy Values in Pancasila and Citizenship Studies in general, it can be said that the implementation of democratic values in Citizenship Studies has gone well. Pancasila and Citizenship Education will be important to teach the upholding of human rights in various ways. The use of democratic principles in Pancasila and Citizenship Education will result in a broader human rights training program for students.*

**Keyword:** Pancasila and Citizenship Education, Democratic Education, Democracy

### ABSTRAK

PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang mengandung dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi kandungan ide, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dan analisis data sekunder, penelitian ini juga bertujuan menumbuhkan demokratis dengan mendorong pengembangan informasi, sikap, ide, dan keterampilan kewarganegaraan yang diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Demokrasi Nilai- Nilai dalam Studi Pancasila dan Kewarganegaraan Secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi nilai nilai demokrasi dalam Studi Kewarganegaraan telah berjalan dengan baik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menjadi penting untuk mengajarkan tegaknya HAM dalam berbagai cara. Penggunaan prinsip demokrasi dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menghasilkan program pelatihan HAM yang lebih luas bagi siswa.

**Kata Kunci:** Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Demokrasi, Demokrasi

#### Corresponding Author:

Widiya Julita,  
Universitas Riau,  
Soebrantas KM 12,5, Simpang Baru, Indonesia  
Email: [widiya.julita5151@student.unri.ac.id](mailto:widiya.julita5151@student.unri.ac.id)



## 1. PENDAHULUAN

Demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Meminjam pendapat Abraham Lincoln, demokrasi: "*government of the people, by the people, and for the people*". Dalam bahasa yang lebih singkat dan lugas, demokrasi rakyatlah yang menentukan siapa saja yang berhak untuk berkuasa dan diperintah sebagai wakil dari rakyat. Dalam arti politik - makna formal - demokrasi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem dimana didalamnya terdapat banyak partai, yang Saling bebas berkompetisi dan memiliki sistem mekanisme pemilihan dengan menjamin "kebebasan" dan terlaksananya "Hak Asasi Manusia". Demokrasi secara formal menekankan pada bagaimana proses demokrasi berjalan. Sebaliknya secara substansial makna demokrasi menekankan pada keputusan yang diambil (Hidayah et al., 2023).

Secara teoretik, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang mengandung dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi kandungan ide, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Secara programatik, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengungkus nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Muhibbin & Sumarjoko, 2016).

Demokrasi menjadi pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, kesadaran berdemokrasi dari setiap warga negara menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesadaran berdemokrasi memang tidak terbentuk begitu saja; karenanya, dalam proses pembinaannya harus ditanamkan dan dipupuk sejak usia dini melalui pendidikan yang tepat. Marilah, kita jadikan hal ini sebagai satu tanggung jawab bersama dalam menumbuhkan nilai demokrasi pada setiap sanubari generasi penerus bangsa, termasuk lembaga pendidikan. Tanpa adanya kesadaran berdemokrasi, pembangunan bangsa tidak akan dapat berjalan. Karenanya, potensi konflik dan perpecahan masyarakat semakin besar (Setiawati et al., 2024).

Sebagai komitmen terhadap nilai, cita-cita, konsep dan prinsip demokrasi yang digunakan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini dapat dicapai dengan berpartisipasi dalam implementasi atau pengembangan kebijakan publik. Proses demokratisasi melalui pendidikan formal dan informal memerlukan suatu sistem pengalaman (*learning experience*) dalam memberikan pendidikan demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia terkait. Pengalaman belajar tersebut dapat dicapai melalui suatu program kajian atau pembelajaran atau kurikulum yang secara praktis dapat memandu proses pengembangan nilai, cita-cita, konsep dan prinsip demokrasi pada diri peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk merancang program pendidikan yang dapat menjadi sarana pengajaran. Demokrasi untuk menciptakan tatanan sosial yang dapat dianggap sebagai masyarakat demokratis. Proses pengakuan pendidikan Pancasila dalam hal ini diperlukan untuk memberikan pendidikan terkait demokrasi di Indonesia.

Pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang tidak dapat dipelajari sendiri. Jika tanggung jawab, barang dan manfaat demokrasi tidak dapat dipahami dan dihargai dengan baik oleh warga negara, maka hilanglah semua harapan bahwa warga negara akan bersedia melakukannya berjuang untuk melindunginya. Penekanannya juga pada kenyataan bahwa "pendidikan demokrasi harus didekati dengan kesadaran dan keseriusan", artinya pendidikan demokrasi harus dilaksanakan dengan kesadaran dan keseriusan. Oleh karena itu, dengan mengkonsep ulang pendidikan kewarganegaraan sebagai alat pendidikan demokrasi, Pendidikan kewarganegaraan seharusnya mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menggunakan hak-hak demokrasinya. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan demokrasi mempunyai peranan dalam membawa warga negara menuju negara demokrasi. Dalam hal ini warga negara diharapkan mampu mengembangkan keterampilan partisipasi dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, demokrasi dalam tatanan kehidupan budaya, politik, sosial dan ekonomi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dan analisis data sekunder, yang melibatkan sumber-sumber akademis, dokumen sejarah, serta hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menumbuhkan demokratis dengan mendorong pengembangan informasi, sikap, ide, dan keterampilan kewarganegaraan yang diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Istilah pendidikan kewarganegaraan beragam dan setiap negara memiliki nama tersendiri sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang dikembangkan oleh negara masing-masing. Di Indonesia, PKn sering diartikan sebagai pendidikan untuk membentuk pemahaman warga negara atau *citizen education*. Beberapa ahli juga menyamakan PKn dengan pendidikan politik, demokrasi, atau hak asasi manusia.

Solusi yang diberikan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung terwujudnya demokrasi di suatu negara adalah pendidikan kewarganegaraan. Namun pada kenyataannya, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di Indonesia belum begitu memberikan hasil memuaskan. Oleh karena itu sangat perlu adanya persiapan untuk membentuk warga Negara yang mampu berpartisipasi baik secara cerdas mampu bertanggung jawab. Masyarakat yang memiliki hak berfikir, berpendapat dan berserikat seharusnya mampu menjadi agen untuk mengontrol kinerja pemerintah terutama dalam masalah kebijakan. Selain itu mampu berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, artian partisipasi aktif menelaah dan menentukan siapa yang layak dan siap dari sudut pandang objektif warganegara terhadap kejelasan visi dan misi calon pemimpin. Juga mampu melayangkan kritik terhadap kinerja pemerintah lewat surat kabar atau pun aksi demonstrasi yang sesuai prinsip demokrasi etis (Mufidah, 2020).

Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) bertujuan untuk memperkuat karakter (*character education*) masyarakat Indonesia, meningkatkan keterampilan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat Indonesia, serta meningkatkan keterampilan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab Warga Negara yang Bertanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, cerdas, aktif, kritis dan demokratis, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengembangkan demokrasi yang merdeka, setara, dan beradab Toleransi dan rasa tanggung jawab Tujuan pendidikan kewarganegaraan harus didukung oleh norma dan cara hidup yang demokratis (Widiyanto & Istiqomah, 2023).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenalkan siswa pada nilai-nilai demokrasi yang tentunya menjadi pilar terpenting dalam pendidikan siswa demokratis di lingkungan sekolah dan masyarakat. Siswa berperan aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah dan memiliki tanggung jawab dengan mendukung serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting (Juanda & Rahayu, 2019).

### B. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Demokrasi di Indonesia

Sebagaimana diakui oleh semakin banyak pakar tentang demokrasi pada tingkat internasional, metode yang paling strategis untuk merasakan pengalaman demokrasi adalah dengan melalui apa yang disebut sebagai "pendidikan demokrasi". Pendidikan demokrasi mengenai penyampaian, penyebaran, dan penerapan gagasan, sistem, nilai, budaya, serta praktik demokrasi melalui proses pendidikan secara ringkas.

---

Pendidikan demokrasi penting bukan hanya bagi negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara yang demokrasi nya sudah mapan. Contoh yang jelas adalah ketika "Civitas International" didirikan pada bulan Juni 1995 di Praha. Tak kurang dari 450 pemimpin pendidikan demokrasi dari 52 negara bertemu dalam acara tersebut. Bersama-sama, mereka sepakat untuk membentuk "Civitas International" yang menegaskan bahwa pendidikan demokrasi memiliki peran penting dalam membentuk "budaya sipil" untuk kesuksesan dalam mengembangkan dan menjaga pemerintahan demokratis. Menguatkan budaya kewarganegaraan merupakan tujuan utama dari pendidikan kewargaan. Namun demikian, wajar untuk diakui bahwa meskipun para ahli pendidikan kewarganegaraan umumnya setuju bahwa peran pendidikan kewarganegaraan dalam memajukan demokrasi dan kewarganegaraan demokratis sudah jelas, namun pada kenyataannya terdapat perbedaan yang muncul dalam praktiknya. Mereka sepakat bahwa demokrasi-demokrasi yang sedang berkembang, seperti di Indonesia, memerlukan sarana di mana generasi muda dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diperlukan untuk mendukung, memelihara, dan melestarikan demokrasi. Tak bisa disangkal bahwa pemahaman mengenai pentingnya pendidikan kewargaan mulai meningkat pada era 1990an dengan berbagai interpretasi yang beragam. Bagi beberapa pakar, pendidikan kewargaan dianggap selaras dengan "pendidikan demokrasi" (*democracy education*). Di sini, pembelajaran tentang kewarganegaraan melibatkan penelitian dan diskusi terkait dengan pemerintahan, konstitusi, badan-badan demokrasi, asas hukum, serta hak dan kewajiban sebagai warganegara. Adapun para ahli lain mengacu kepada pendidikan kewarganegaraan sebagai "*citizenship education*" yang menekankan pentingnya demokrasi, partisipasi warganegara, dan keterlibatan dalam membangun masyarakat yang demokratis.

Masih terdapat pandangan dari beberapa ahli bahwa pendidikan kewargaan mencakup pengetahuan mengenai lembaga-lembaga dan sistem yang ada dalam pemerintahan, sejarah politik, jalannya demokrasi, hak serta kewajiban warga negara, administrasi publik, dan hukum. Selanjutnya, pendidikan kewargaan juga melibatkan kemampuan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek seperti partisipasi aktif sebagai warganegara, pemikiran kritis, penyelidikan, dan kerjasama. Penting kiranya untuk diingat bahwasanya pendidikan kewargaan juga melibatkan aspek keadilan sosial, pemahaman antar budaya, serta perlindungan lingkungan hidup.

Dengan demikian, pendidikan demokrasi yang dibicarakan sebelumnya, dalam beberapa aspeknya, hampir sama dengan konsep "pendidikan kewarganegaraan". Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pendidikan demokrasi. Hal ini juga terlihat dengan jelas dari penjabaran Civitas International, bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif mencakup pemahaman dasar tentang bagaimana demokrasi beroperasi dan institusi-institusinya. Selanjutnya, pemahaman mengenai prinsip "*rule of law*", serta hak asasi manusia yang tercermin dalam berbagai rumusan, perjanjian, dan kesepakatan baik skala internasional maupun lokal. Ketiga, peningkatan kemampuan partisipatif akan memberikan kekuatan kepada peserta didik untuk merespon dan menyelesaikan masalah.

Menyelesaikan persoalan masyarakat mereka dengan pendekatan demokratis. Kaping papat, paparikan budaya demokrasi lan perdamaian ing lingkungan pendidikan lan kabeh aspek kehidupan masyarakat. Di beberapa negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Australia, program pendidikan kewarganegaraan telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah paling tidak satu dekade terakhir. Negara-negara lain, seperti Inggris, mulai menerapkan program "pendidikan kewarganegaraan" pada tahun 2000. Pada tahun 2002, "pendidikan kewarganegaraan" akan dijadikan sebagai bagian penting dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah di Inggris.

Dibalik penerapan pendidikan kewargaan di AS terdapat keyakinan bahwa tradisi demokrasi tidak dapat hanya diwariskan, melainkan harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi

muda melalui sekolah. Selain menjadi postulat penting, menurut banyak pakar pendidikan dan demokrasi Barat, pendidikan kewarganegaraan dianggap sangat penting karena berbagai alasan yang kuat. Di awalnya, kita bisa melihat adanya peningkatan gejala serta kecenderungan *political illiteracy*, yaitu ketidakpedulian warga terhadap isu-isu politik. Banyak penduduk Barat, terutama anak muda kurang memahami politik, tidak memahami sepenuhnya kerja demokrasi serta institusinya. Kemudian, terjadi peningkatan apatis politik, yang tercermin dari minimnya partisipasi warga negara dalam pemilihan umum serta keterlibatan dalam kegiatan politik lainnya (Kewarganegaraan, 2005).

### C. Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya pelajaran yang memuat secara khas materi-materi pembelajaran yang berhubungan langsung dengan isu-isu politik, kenegaraan dan pemerintahan, termasuk di dalamnya kajian mengenai ideologi, konstitusi, dan demokrasi (Yuniarto, 2020).

Salah satu faktor pendukung terlaksananya nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn dengan baik karena adanya sikap saling menghargai dan mendukung antara guru dan peserta didik. Sikap yang dimaksud seperti kebebasan dalam berpendapat dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya, memiliki kepercayaan diri, serta aktif berpartisipasi dan bekerjasama. Berbagai sikap tersebut merupakan aspek yang terkandung dalam nilai-nilai demokrasi. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru senantiasa menumbuhkan kembangkan pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan memperlihatkan kesantunan dan kedewasaan dalam menangani serta memecahkan setiap persoalan yang dihadapi. Kerja sama yang dibangun harus berdasarkan pada prinsip kesetaraan sehingga muncul kepercayaan diri dan kebebasan dalam berekspresi yang merupakan hak dasar setiap manusia dalam negara demokrasi.

Salah satu nilai demokrasi lainnya yakni kebebasan. Kebebasan dalam berorganisasi di sekolah sangat dibutuhkan untuk proses belajar peserta didik. Organisasi seperti OSIS sebagai wahana untuk pengembangan karakter demokratis peserta didik. Oleh karena itu keterlibatan peserta didik dalam organisasi sangat penting. Sikap berani dan percaya diri dalam berpartisipasi dalam setiap kegiatan di kelas dan organisasi sangat menentukan kualitas karakter demokratis, sebaliknya rasa takut, inferior, serta curiga terhadap orang lain hanya akan melemahkan kualitas karakter demokratis itu sendiri, serta berpotensi menciptakan hubungan yang kurang harmonis sesama peserta didik (Ramadani et al., 2022).

Implementasi Demokrasi Nilai-Nilai dalam Studi Pancasila dan Kewarganegaraan Secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi nilai nilai demokrasi dalam Studi Kewarganegaraan telah berjalan dengan baik. Penerapan prinsip demokrasi pada mata kuliah ini siswa memiliki prinsip egaliter, selain menegakkan prinsip demokrasi, seperti mendorong dan mencegah tumbuhnya sifat otoriter di ruang kelas sepanjang kelas. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan menjadi penting untuk mengajarkan tegaknya HAM dalam berbagai cara. Penggunaan prinsip demokrasi dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menghasilkan program pelatihan HAM yang lebih luas bagi siswa (Rizki Ramdani, 2021).

## 4. KESIMPULAN

Dengan demikian, Pendidikan Demokrasi yang dibicarakan sebelumnya, dalam beberapa aspeknya, hampir sama dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pendidikan demokrasi. Hal ini juga terlihat dengan jelas dari penjabaran Civitas International, bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif mencakup pemahaman dasar tentang bagaimana demokrasi beroperasi dan institusi-institusinya.

---

Di beberapa negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Australia, program pendidikan kewarganegaraan telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah paling tidak satu dekade terakhir. Negara-negara lain, seperti Inggris, mulai menerapkan program pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2000. Pada tahun 2002, pendidikan kewarganegaraan akan dijadikan sebagai bagian penting dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah di Inggris. Di balik penerapan pendidikan kewarganegaraan di AS terdapat keyakinan bahwa tradisi demokrasi tidak dapat hanya diwariskan, melainkan harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui sekolah.

Selain menjadi tujuan penting, menurut banyak pakar pendidikan dan demokrasi Barat, pendidikan kewarganegaraan dianggap sangat penting karena berbagai alasan yang kuat. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya pelajaran yang memuat secara khas materi-materi pembelajaran yang berhubungan langsung dengan isu-isu politik, kenegaraan dan pemerintahan, termasuk di dalamnya kajian mengenai ideologi, konstitusi, dan demokrasi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menjadi penting untuk mengajarkan tegaknya HAM dalam berbagai cara. Penggunaan prinsip demokrasi dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menghasilkan program pelatihan HAM yang lebih luas bagi siswa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, Y., Ulfah, R. A., & Ulfah, N. (2023). Membangun Demokrasi Sehat dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 4(2), 137–146. <https://doi.org/10.21154/asanka.v4i2.4813>
- Juanda, J., & Rahayu, N. Q. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Sarana Pembelajaran Demokrasi Di Sekolah: Suatu Alternatif Pembelajaran yang Demokratis. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 101. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i1.1102>
- Kewargaan, P. (2005). Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi Pendidikan kewargaan jelas mulai. 2000, 219–225.
- Mufidah, N. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Dalam Mewujudkan Smart And Good Citizen. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 259–269. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v1i2.22>
- Muhibbin, A., & Sumarjoko, B. (2016). Model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media massa untuk meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya .... *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1). <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/2035>
- Ramadani, W. O. D., Noe, W., & Rajaloe, N. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Kelas Viii Smp Negeri 4 Kota Ternate. *Jambura Journal Civic Education*, 2(1), 90–101. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v2i1.14505>
- Rizki Ramdani, D. A. D. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA ...*, 5(3), 9034–9038. <https://jurnal.stkipggritreggalek.ac.id/index.php/dewantara/article/view/102%0Ahttps://jurnal.stkipggritreggalek.ac.id/index.php/dewantara/article/download/102/66>
- Setiawati, I., Mahfuroh, L., & Azha, N. F. (2024). Pentingnya Pembelajaran PKN di SD Untuk Menumbuhkan Kesadaran Berdemokrasi Sejak Dini. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 10. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.472>
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32. No.1(1), 1–10. <http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp/article/view/2826>
- Yuniarto, B. (2020). Membangun Kesadaran Demokrasi Melalui Pendekatan Kontekstual Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 9(1), 56–72. <https://doi.org/10.24235/edueksos.v9i1.6388>